



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN



TELEBU

KEMENKUM KALSEL NEWS

MINGGU KE-

3

SEPTEMBER 2025



KABUPATEN BALANGAN
SIAP BENTUK POSBANKUM



TUTUP RANGKAIAN EXPO
KUMKM BANJARBARU



SOSIALISASI ETIKA DAN
DISIPLIN

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Kemenkum Kalsel Ikuti Apel Bersama ASN, Wamenko Otto Hasibuan Tekankan Netralitas dan Profesionalitas



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti Apel Bersama ASN di Lingkungan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan, pada Senin (15/9/2025). Kegiatan ini berlangsung secara virtual dari Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kalsel.

Apel tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi P3H, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, para pejabat manajerial dan non manajerial, CPNS, serta jajaran dari Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan. Dalam amanatnya, Otto menegaskan bahwa apel bersama merupakan bentuk kedisiplinan dan komitmen ASN sebagai abdi negara.

“ASN dituntut untuk tegak lurus pada aturan serta menjauhkan diri dari dinamika politik dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Netralitas ASN harus diwujudkan melalui sikap, tindakan, pelayanan publik, hingga dalam pengambilan keputusan birokrasi,” tegas Otto.

Lebih lanjut, Otto mengingatkan bahwa ASN merupakan perekat bangsa. Profesionalitas harus ditunjukkan melalui kinerja yang berkualitas, dengan tetap menjaga integritas dan kedisiplinan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Kegiatan apel bersama ini berlangsung dengan baik dan lancar, menjadi momentum penguatan kembali komitmen netralitas, kedisiplinan, serta integritas ASN di lingkungan Kementerian Hukum.



Kanwil Kemenkumham Kalsel Ikuti Webinar “Korporasi Risiko Tinggi”



Jakarta - Banyak kebijakan pemerintah saat ini yang berjalan secara sektoral, belum terintegrasi, bahkan terkadang tumpang tindih. Untuk menangani hal tersebut, membutuhkan suatu keterpaduan yang dapat memastikan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan dalam praktik penyusunan kebijakan, masih terdapat fragmentasi regulasi, koordinasi lintas sektor yang lemah, serta belum optimalnya sinergi antara pusat dan daerah. Dalam konteks inilah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub hadir sebagai wadah strategis sekaligus menjadi simpul untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Saya berharap, mudah-mudahan (melalui) kerja sama lintas kementerian, karena jujur selama ini yang membuat kita masih stuck untuk maju, salah satunya adalah ego sektoral. Kementerian Hukum seperti yang saya sampaikan, bahwa kita punya tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, dan juga melakukan harmonisasi semua kebijakan-kebijakan dalam bentuk regulasi yang akan disusun,” kata Supratman.

Mengingat peran sentral Kementerian Hukum sebagai leading sector dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan, yang pada esensinya merupakan bagian dari kebijakan publik, maka diperlukan adanya mekanisme yang mampu menyatukan dan mengintegrasikan hasil analisis kebijakan yang tersebar di berbagai sektor guna mendukung pembentukan hukum dan peraturan perundangundangan yang berkualitas.

“Mencermati berbagai permasalahan sebelumnya, maka proses perumusan kebijakan dapat dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan dampak yang mungkin terjadi. Sinergi ini akan mewujudkan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan stabilitas sosial,” ujarnya saat meluncurkan FKK: Legal Policy Hub dan Policy Talks Tematik I: Penguatan Inovasi Industri Pangan Untuk Pertumbuhan Ekonomi.

FKK, ujar Supratman, akan meningkatkan kualitas kebijakan publik, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berbasis bukti sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat, serta menyepakati arah kebijakan yang konsisten dan berorientasi hasil (result-oriented policy).

Sektor pangan contohnya. Sektor ini memiliki peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, industri pengolahan pangan menyumbang sekitar 15 persen dari total nilai industri manufaktur nasional, serta menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja. Tidak hanya itu, sektor makanan dan minuman menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional dengan nilai PDB mencapai Rp853 triliun pada tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh sekitar ~4,5% pada tahun 2024.

“Saya ingin mengambil salah satu contoh, bagaimana kemudian sebuah kebijakan untuk menyederhakan regulasi dalam rangka penyaluran pupuk untuk memperkuat ketahanan pangan kita, yang akhirnya bisa memangkas 143 regulasi, mulai dari tingkat pusat sampai kepada regulasi di tingkat pemerintah daerah,” jelas Supratman di Graha Pengayoman, Senin (15/09/2025).

Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan dalam bentuk Policy Brief untuk mempercepat modernisasi sektor pangan, memperluas ekspor, memperkuat UMKM pangan, sekaligus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Acara ini diikuti lebih dari 100 peserta dari 50 kementerian/lembaga/pemerintah daerah, asosiasi pangan, akademisi, praktisi, serta organisasi masyarakat sipil, baik secara luring maupun daring. Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun ekosistem kebijakan yang lebih integratif.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyambut baik peluncuran Legal Policy Hub sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. “Inisiatif ini akan menjadi simpul penting dalam menyatukan berbagai analisis kebijakan yang selama ini tersebar di banyak sektor. Dengan adanya forum komunikasi kebijakan, diharapkan proses perumusan regulasi dapat lebih terintegrasi, selaras, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dari perspektif daerah, kami melihat Legal Policy Hub dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik,” ungkap Alex.

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Launching Legal Policy Hub Secara Daring



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti kegiatan Launching Forum Komunikasi Kebijakan: Legal Policy Hub dan Policy Talks Tematik I yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada Senin (15/9).

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi” ini diikuti secara daring dari Ruang Rapat Kakanwil Kemenkum Kalsel oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Kalsel.

Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menekankan bahwa pembentukan Legal Policy Hub bertujuan untuk mengatasi fragmentasi regulasi, melemahkan ego sektoral, dan memperkuat sinergi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui wadah ini, diharapkan proses perumusan kebijakan dapat dilakukan lebih holistik, berbasis bukti, dan menghasilkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, termasuk Kepala BSK Hukum Kemenkum, Deputi BRIN, Deputi Badan Pangan Nasional, serta pejabat LAN RI. Selain diikuti secara luring di Graha Pengayoman, acara ini juga dihadiri lebih dari 100 peserta dari 50 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, dan praktisi secara daring.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyambut baik peluncuran Legal Policy Hub sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi kebijakan.

“Inisiatif ini akan menjadi simpul penting dalam menyatukan berbagai analisis kebijakan yang selama ini tersebar di banyak sektor. Dengan adanya forum komunikasi kebijakan, diharapkan proses perumusan regulasi dapat lebih terintegrasi, selaras, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dari perspektif daerah, kami melihat Legal Policy Hub dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik,” ungkap Alex.



Pelatihan Protokoler, Langkah Kanwil Kemenkum Kalsel Tingkatkan Kualitas Aparatur



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti kegiatan Pembukaan Pelatihan Protokoler Angkatan I Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (16/9) ini dibuka langsung oleh Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus, dan diikuti secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Bagian TU dan Umum, Rustam Sakka, beserta jajaran.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya dalam bidang keprotokolan.

“Protokol merupakan wajah pertama dari institusi. Melalui pelatihan ini, kami berharap jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel semakin profesional dalam melaksanakan tugas keprotokolan, sekaligus menjaga marwah kementerian,” ujarnya.

Pelatihan Protokoler Angkatan I ini dilaksanakan dengan metode blended learning pada 11–19 September 2025, melibatkan 40 peserta dari 10 Kantor Wilayah Kementerian Hukum di bawah koordinasi Balai Diklat Hukum Jawa Tengah.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan aparatur Kemenkum di daerah semakin siap memberikan dukungan keprotokolan yang berkualitas, selaras dengan standar nasional maupun kebutuhan organisasi.



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan

Kemenkum Kalsel Terima Kunjungan Tim BNNP Kalsel: Perkuat Sinergi Bidang Hukum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menerima kunjungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan, Selasa (16/09/2025).

Kunjungan BNNP Kalsel ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat pusat pada Januari lalu, terkait Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum. Kerja sama di tingkat wilayah antara BNNP Kalsel dengan Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel nantinya akan menyepakati dukungan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, melalui Kepala Bagian TU dan Umum, Rustam Sakka menyambut baik kehadiran jajaran BNNP Kalsel.

“Kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat sinergi di daerah, sehingga upaya pencegahan dan penanganan masalah narkoba dapat berjalan seiring dengan penegakan hukum yang efektif,” ujarnya.

Pertemuan ini membahas peluang kerja sama di bidang pertukaran data, penguatan regulasi, hingga edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan adanya sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan BNNP Kalsel, diharapkan penanganan narkoba di daerah dapat lebih komprehensif, selaras dengan kebijakan nasional.

Hadir dalam kegiatan ini dari Kanwil Kemenkum Kalsel, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka didampingi Pranata Humas Ahli Muda Eko Sulistiyono. Dari BNNP Kalsel, hadir dalam Kegiatan Kepala Bagian Umum, H. Wahyuni, Katim Bidang Rehabilitasi, Hj. Riny Henderawaty, dan Katim Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Rakhmadiansyah.



ASN BerAKHLAK, Kanwil Kemenkum Kalsel Gandeng BKN Sosialisasikan Etika dan Disiplin



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VIII Banjarmasin dalam kegiatan Sosialisasi Kode Etik, Kode Perilaku, dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Selasa (16/09) di Balai Pertemuan Garuda.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Yankum, Meidy Firmansyah serta diikuti oleh seluruh pegawai dan CPNS Kanwil Kemenkum Kalsel. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif terkait kode etik, kode perilaku, dan disiplin PNS, guna meningkatkan pelayanan publik sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran disiplin di lingkungan kerja.

Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk memperkuat kembali pemahaman dasar para ASN.

“Kegiatan ini strategis untuk merefresh pemahaman kita terkait Kode Etik, Kode Perilaku, dan Disiplin. ASN memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pemberi pelayanan publik, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa. Untuk itu, nilai dasar ASN BerAKHLAK harus senantiasa menjadi pedoman,” ujar Alex.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Alfian Zulkiram, Auditor Manajemen ASN Madya, dan Muhammad Syarif, Auditor Manajemen ASN Muda, keduanya dari BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin. Materi yang dibawakan meliputi Penerapan Pembinaan Kode Etik dan Disiplin PNS serta Disiplin PNS, dengan penekanan pada implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari ASN.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap seluruh pegawai dapat memperkuat integritas, disiplin, dan profesionalisme sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta menjaga citra positif Kementerian Hukum di masyarakat.



Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Media Monitoring Konvensional dan Media Sosial bersama Biro Hukerma dan Kurasi



Banjarmasin, Humas_Info – Tim Kerja Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Sosialisasi Media Monitoring: Media Konvensional dan Media Sosial yang digelar oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum pada Selasa (16/09/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat TU dan Umum secara daring.

Sosialisasi ini diikuti oleh Ketua Tim Kerja Humas, Eko Sulistiyono beserta pelaksana dan CPNS Tim Kerja Humas. Acara dibuka dengan pemaparan dari Biro Hukerma terkait laporan hasil monitoring media konvensional dan media sosial, yang kemudian dilanjutkan penjelasan teknis oleh Tim Kurasi.

Dalam paparannya, dijelaskan hasil evaluasi media monitoring periode Agustus–September 2025. Pada aspek media konvensional, monitoring dilakukan terhadap TV, media cetak, dan online berbasis keyword serta analisis sentimen. Peringkat Kanwil/Eselon I ditentukan dari jumlah pemberitaan positif di media tier 1-2, dengan catatan masih terdapat kendala perbedaan data dashboard dengan laporan, cut-off waktu, serta penggunaan istilah “Kemenkum”.



Sementara pada aspek media sosial, pemantauan dilakukan melalui keyword dan hashtag resmi seperti #KementerianHukum dan #LayananHukumMakinMudah. Penilaian dilakukan melalui peringkat akun teraktif berdasarkan jumlah postingan serta akun terpopuler berdasarkan engagement. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan data, kebijakan platform, serta perbedaan hitungan engagement. Solusi yang disarankan adalah konsistensi penggunaan caption sesuai keyword, rotasi hashtag, dan diversifikasi unggahan.

Secara umum, kegiatan ini menekankan pentingnya konsistensi publikasi media untuk memperkuat branding Kementerian Hukum, serta mendorong standarisasi penggunaan keyword “Kementerian Hukum/Kemenkum” dan optimalisasi konten di media tier 1-2. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri.



Kanwil Kemenkum Kalsel Sosialisasikan Pentingnya Merek Kolektif di EXPO KUMKM Banjarbaru 2025



Banjarbaru, Humas_Info – Memasuki hari kelima pelaksanaan EXPO KUMKM Banjarbaru 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menghadirkan layanan hukum kepada masyarakat, Senin (15/9) di Lapangan Dr. Murdjani, Banjarbaru.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, bersama jajaran. Dalam kesempatan tersebut, Meidy melakukan kunjungan ke stan Koperasi Merah Putih dan memberikan penjelasan mengenai pentingnya Merek Kolektif sebagai upaya memperkuat identitas dan perlindungan hukum produk koperasi.

“Pendaftaran Merek Kolektif sangat penting, khususnya bagi koperasi. Selain memberikan kepastian hukum, merek juga menjadi identitas bersama yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasaran,” ujar Meidy Firmansyah.

Selain sosialisasi, tim layanan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Kalsel juga membuka layanan konsultasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Mereka tampak antusias menggali informasi mengenai manfaat pendaftaran merek, tata cara pendaftaran, hingga prosedur administrasi hukum lainnya.

Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung baik dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat maupun pelaku usaha. Terutama Koperasi Merah Putih yang merasa terbantu dengan adanya penjelasan langsung dari pejabat Kanwil Kemenkum Kalsel.



Posbankum sebagai Solusi Penyelesaian Permasalahan Hukum, Kabupaten Balangan Siap Bentuk Posbankum di seluruh Desa/Kelurahan



Banjarmasin_P3H_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) sebagai bagian dari proses Pembangunan Hukum di Wilayah, melaksanakan Audiensi bersama Wakil Bupati Balangan, membahas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada Selasa, (16/09)

Hadir dalam kegiatan H. Akhmad Fauzi selaku Wakil Bupati Balangan, Anton Edward Wardhana selaku Kepala Divisi PPPH, Akhmad Fauzi selaku Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Bejo Priyogo selaku Plt. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3A P2KB PMD) beserta jajaran, dan JFT Analis Hukum Pemda Balangan, dan JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini membahas terkait dengan pembentukan Pos Bantuan Hukum di Kabupaten Balangan. Adapun kehadiran Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum bagi masyarakat.

Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana, dalam kegiatan menjelaskan berbagai layanan didalam Posbankum, selain itu Pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

"Adapun Posbankum sendiri didalamnya memiliki beberapa layanan yang sangat dibutuhkan bagi setiap masyarakat yaitu Layanan Informasai Hukum dan Konsultasi Hukum, Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi, Layanan Penyelesaian Konflik/Sengketa melalui Mediasi, dan Layanan Rujukan Hukum. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat di level kelurahan maupun desa," Ungkap Anton

Wakil Bupati balangan mengapresiasi kehadiran Posbankum ini, dan siap untuk berkolaborasi dalam membentuk Posbankum di setiap desa/kelurahan.

"Perihal yang sering terjadi dibawah yaitu kadangkala masyarakat pada saat mengalami masalah hukum, kebingungan untuk berkonsultasi dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum. Kita mengapresi dan siap dalam pembentukan Posbankum di balangan," ungkap Taufik



Di Kabupaten Balangan sendiri terdapat 5 (lima) desa/kelurahan yang telah membentuk Posbankum dan teregister di Kementerian Hukum, sedangkan jumlah Desa dan Kelurahan sebanyak 157. Oleh karena itu dibutuhkan langkah strategis dan kolaborasi antara instansi terkait untuk membentuk Posbankum.

Menanggapi hal ini, Plt. Kepala Dinas PMD, Bejo Priyogo megungkapkan bahwa akan segera menindaklanjuti perihal pembentukan Posbankum. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Balangan juga berharap Kanwil Kemenkum Kalsel dapat memberikan pembinaan kepada sumber daya manusia yang nantinya menjalankan layanan posbankum.

"Kita akan segera bergerak menindaklanjuti perihal pembentukan Posbankum ini, untuk itu ketika nantinya Posbankum sudah terbentuk, diharapkan adanya pengawalan atau pembinaan dari Kanwil agar nantinya sumberdaya manusia di dalam Posbankum dapat menjalankan layanan hukum dengan maksimal," ungkap Bejo.

Dalam pembinaan sumber daya manusia di Posbankum Dianor selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda, memaparkan program Pelatihan Paralegal Serentak dan Peacemaker Training.

"Posbankum merupakan wadah masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, untuk itu dibutuhkan Paralegal dan Juru Damai sebagai motor penggeraknya. Untuk paralegal sendiri kami siap memfasilitasi pelatihan/pendidikan paralegal yang dikemas dalam program Parlentak, nantinya Pemberi Bantuan Hukum yang telah telah terakreditasi sebagai pelaksana. Sedangkan untuk Kepala Desa/Lurah dapat mengikuti Peacemaker Training guna mendapatkan pelatihan khusus sebagai juru damai yang di selenggarakan langsung oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional," Ungkap Dianor.

Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk mendorong pembentukan Posbankum. Dengan adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik antar instansi terkait, diharapkan Posbankum dapat terbentuk di setiap Desa/Kelurahan di Kalimantan Selatan.

Layanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel Tutup Rangkaian EXPO KUMKM Banjarbaru 2025

Banjarbaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menutup rangkaian layanan hukum pada kegiatan EXPO KUMKM Banjarbaru 2025, Selasa (16/09) di Lapangan Dr. Murdjani, Banjarbaru.

Pada kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, bersama jajaran hadir langsung mendampingi tim layanan hukum. Kegiatan hari terakhir ini diwarnai dengan kunjungan dari Kementerian UMKM Kabupaten Kotabaru, yang secara khusus berkonsultasi mengenai pendaftaran Merek Kolektif untuk Koperasi Merah Putih.

Meidy Firmansyah menjelaskan, pendaftaran Merek Kolektif memiliki peran penting untuk melindungi identitas dan produk koperasi.

“Langkah ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing produk koperasi di tingkat regional maupun nasional,” ujarnya.

Selain itu, tim Layanan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Kalsel juga memberikan konsultasi langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya koperasi dan UMKM dari Kabupaten Kotabaru. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan seputar prosedur pendaftaran merek kolektif hingga administrasi hukum lainnya yang dapat mendukung pengembangan usaha.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan layanan hukum dalam EXPO KUMKM Banjarbaru 2025 berjalan lancar dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat serta pelaku usaha. Kehadiran layanan hukum dari Kanwil Kemenkum Kalsel dinilai sangat membantu dalam memberikan pemahaman dan solusi hukum yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM.



Pelatihan Keprotokolan 2025: Kanwil Kemenkum Kalsel Siapkan SDM Profesional

Banjarmasin, TUM_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bagian Tata Usaha dan Umum mengikuti Pelatihan Teknis Keprotokolan Angkatan I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum di Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, Senin s.d. Jumat (15–19/9/2025).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menfikut sertakan dua orang pelaksana yang hadir langsung yakni Noviana Septiawaty dan God Shall Obey Parlindungan Sitohang Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Hukum yang dalam sambutannya menekankan pentingnya keseriusan, disiplin, dan antusiasme seluruh peserta dalam mengikuti rangkaian pelatihan.



“Jadikan pelatihan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan teknis protokoler sesuai peraturan perundang-undangan, mengasah sensitivitas dan ketepatan dalam mengambil keputusan di lapangan, serta menumbuhkan sikap profesional, tanggap, dan santun dalam setiap situasi,” ungkapnya.

Kepala BPSDM Hukum juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Diklat Hukum Jawa Tengah serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan. Usai pembukaan, ia langsung memberikan materi tentang Keprotokoleran. Dalam paparannya, ditegaskan bahwa protokoler tidak hanya terkait teknis pelaksanaan acara resmi, tetapi juga merepresentasikan wajah dan wibawa institusi. Profesionalisme petugas protokoler menjadi kunci dalam menjamin ketertiban acara, penghormatan terhadap tata nilai, serta kesiapan organisasi dalam memberikan pelayanan yang paripurna.



Selain itu, peserta juga mendapatkan materi tentang Personal Branding yang disampaikan oleh Crystal Management Jogjakarta, guna meningkatkan kepercayaan diri dan citra positif dalam mendukung tugas keprotokolan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan pegawai dapat mengasah keterampilan keprotokoleran dan membangun sikap profesional demi mendukung tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam setiap penyelenggaraan kegiatan resmi.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Penutupan EXPO KUMKM Banjarbaru 2025, Hadirkan Layanan Hukum untuk UMKM

Banjarbaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) turut menghadiri acara Penutupan EXPO KUMKM Banjarbaru 2025 yang digelar pada Selasa (16/09) di Lapangan Dr. Murdjani, Banjarbaru. Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah bersama tim.

Selama penyelenggaraan EXPO, Kanwil Kemenkum Kalsel juga membuka layanan hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Layanan yang diberikan meliputi bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) serta layanan Kekayaan Intelektual (KI), mulai dari konsultasi pendaftaran badan usaha hingga perlindungan merek dagang. Kehadiran layanan ini mendapat respons positif dari masyarakat karena memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam berusaha.

Acara penutupan diawali dengan pemutaran rekapitulasi kegiatan selama enam hari penyelenggaraan. Dari hasil rekapitulasi, Warung Firdaus Komet tercatat memperoleh omzet terbesar selama gelaran EXPO.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Ketenagakerjaan Kota Banjarbaru, Sartono secara resmi menutup kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Sartono menyampaikan bahwa EXPO KUMKM Banjarbaru 2025 mencatat jumlah pengunjung sekitar 4.500 orang dengan total omzet kurang lebih Rp. 535 juta.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyerahkan sertifikat partisipasi kepada para peserta yang telah mendukung suksesnya acara.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan EXPO yang dinilainya berhasil menggairahkan potensi usaha lokal.

“Kegiatan ini bukan hanya memberikan ruang promosi bagi pelaku UMKM, tetapi juga menunjukkan betapa besar peran masyarakat dalam menggerakkan ekonomi daerah. Kanwil Kemenkum Kalsel hadir memberikan layanan hukum sebagai bentuk dukungan nyata, agar pelaku usaha memiliki perlindungan dan kepastian hukum dalam mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel pada kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Implementasi Verifikasi Pemilik Manfaat



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) mengikuti kegiatan Sosialisasi Implementasi Verifikasi Pemilik Manfaat yang dilaksanakan pada Selasa (17/9/2025) di Ruang Rapat Admin. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, staf Bidang Pelayanan AHU, serta Helpdesk Pelayanan AHU.

Kegiatan diawali dengan keynote speech dari Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kementerian Hukum, Dr. Andi Taletting Langi, S.H., S.IP., M.Si., M.Phil. Dalam arahannya, beliau menegaskan pentingnya pengaturan pemilik manfaat (Beneficial Ownership/BO) guna memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan badan hukum, khususnya terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme lintas batas.

“Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang sebenarnya dapat mengendalikan atau memengaruhi suatu korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung,” jelas Andi Taletting.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Hukum melalui Ditjen AHU telah menerbitkan Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat. Regulasi ini mengatur mekanisme verifikasi faktual agar data yang dilaporkan lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tengah dikembangkan BO Gateway sebagai wadah kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam pengelolaan data pemilik manfaat.

Peran notaris disebut sebagai bagian penting dalam implementasi kebijakan ini. Setiap permohonan penerbitan sertifikat, perubahan anggaran dasar, maupun perubahan kepengurusan badan hukum tidak akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) sebelum melalui proses verifikasi pemilik manfaat oleh Ditjen AHU.



Paparan narasumber Ditjen AHU kemudian menyoroti substansi Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 serta penguatan sistem verifikasi. Narasumber menekankan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas badan hukum di Indonesia.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan topik seputar peran notaris, tantangan teknis dalam proses verifikasi, hingga pentingnya sinergi antar lembaga untuk mendukung pengawasan berkelanjutan.

Melalui forum ini, diharapkan tercapai penyamaan persepsi serta peningkatan pemahaman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi regulasi verifikasi pemilik manfaat yang lebih baik dan efektif.



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Dua Rancangan Perbup Balangan



Alex Cosmas Pinem dalam pengantarnya menyampaikan pentingnya proses harmonisasi sebagai langkah untuk memastikan rancangan peraturan bupati memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi bukan hanya menyangkut aspek legal drafting, tetapi juga memastikan agar kebijakan daerah memiliki kepastian hukum, konsistensi, serta implementatif dalam mendukung pembangunan di Balangan,” tegasnya.

Rapat harmonisasi ini membahas secara detail norma yang diatur dalam Ranperbup, mulai dari landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, hingga mekanisme pelaksanaan. Tim Perancang Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan sejumlah masukan teknis, termasuk perbaikan rumusan norma agar lebih sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian istilah agar tidak menimbulkan multitafsir.



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menyelenggarakan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Balangan, yaitu tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Bantuan Pendidikan kepada Santri, serta tentang Optimalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kakanwil Kemenkum Kalsel pada Rabu (17/9/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem membuka langsung jalannya rapat, didampingi Kepala Divisi P3H, Anton Edward Wardhana, serta jajaran JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Balangan hadir Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Akhmad Fauzi, Kepala Bagian Hukum, Muhammad Roji, serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Nanang As'ari serta perwakilan instansi terkait.



Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel. Melalui harmonisasi ini, diharapkan kedua Ranperbup dapat segera ditetapkan dan menjadi dasar hukum yang kokoh dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan pesantren, sekaligus memperkuat tata kelola aspirasi pembangunan daerah melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi Dua Ranperbup Balangan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) secara resmi menyerahkan hasil harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Balangan. Adapun rancangan yang telah melalui proses harmonisasi yaitu Ranperbup tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Bantuan Pendidikan kepada Santri, serta Ranperbup tentang Optimalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyerahan hasil harmonisasi berlangsung setelah rapat pembahasan yang digelar di Ruang Rapat Kakanwil Kemenkum Kalsel pada Rabu (17/9/2025). Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi P3H Anton Edward Wardhana dan jajaran perancang peraturan perundang-undangan, menyerahkan dokumen hasil harmonisasi kepada Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Balangan, Akhmad Fauzi, serta jajaran Bagian Hukum Pemkab Balangan.

Dalam arahannya, Alex Cosmas Pinem menegaskan bahwa harmonisasi merupakan langkah penting untuk memastikan rancangan peraturan bupati tidak hanya sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan regulasi yang lebih tinggi.

“Harmonisasi bukan hanya soal legal drafting, tetapi juga memastikan kebijakan daerah memiliki kepastian hukum, konsistensi, serta implementatif dalam mendukung pembangunan di Balangan,” ujarnya.

Sebelumnya, tim Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan masukan teknis mulai dari penyempurnaan rumusan norma, penyesuaian istilah, hingga penguatan dasar hukum agar kedua Ranperbup dapat lebih mudah diimplementasikan.

Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan Kanwil Kemenkum Kalsel. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Akhmad Fauzi, menilai harmonisasi ini memberi nilai tambah penting bagi penyusunan regulasi di daerah.

“Kami berterima kasih atas pendampingan dan masukan yang konstruktif dari Kanwil Kemenkum Kalsel. Proses harmonisasi ini membuat Ranperbup kami lebih kuat secara substansi maupun formil, sehingga dapat menjadi dasar hukum yang bermanfaat bagi masyarakat Balangan,” ucapnya.

Dengan selesainya proses harmonisasi ini, kedua Ranperbup diharapkan segera ditetapkan sebagai peraturan bupati yang sah, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren serta tata kelola aspirasi pembangunan daerah melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Sosialisasi Manajemen Risiko dan SPIP, Kemenkum Kalsel Dorong Tata Kelola yang Akuntabel



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Rabu (17/09/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko dan SPIP bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus mengantisipasi potensi hambatan melalui strategi mitigasi yang tepat,” ujarnya. Sesi pemaparan materi diawali oleh Patardo Haholongan Nainggolan, S.E., M.Si., QIA., CFE., CHRMP., Koordinator Pengawasan dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Narasumber menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep manajemen risiko di lingkungan instansi pemerintah. Materi yang dipaparkan mencakup jenis-jenis risiko strategis, operasional, program, proyek, hingga kegiatan, serta tahapan proses manajemen risiko mulai dari penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, hingga respon risiko. Menurutnya, manajemen risiko merupakan bagian integral dari SPIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Farah Rizkiah, S.E., M.Sc., Auditor BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan tema “Mengetahui SPIP: Membangun Budaya Pengendalian dan Akuntabilitas”, yang menjelaskan konsep dasar SPIP, termasuk penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Farah menekankan pentingnya budaya pengendalian yang melibatkan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi manajemen risiko serta SPIP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.



Era Baru Ekonomi Lokal: Kanwil Kementerian Hukum Kalsel Gelar Sosialisasi Perdana Pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Merah Putih di Kalimantan Selatan



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Perdana Pendaftaran Merek Kolektif Produk Barang/Jasa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Rabu (17/09) sebagai langkah strategis meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Yankum, Meidy Firmansyah. Dalam sambutannya, Alex menegaskan pentingnya sinergi dalam memastikan keberhasilan implementasi pendaftaran merek kolektif.

“Merek kolektif berfungsi untuk melindungi identitas bersama produk yang dihasilkan oleh koperasi, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Kanwil Kemenkum Kalsel siap memberikan layanan jemput bola dan membantu penuh apabila diperlukan agar proses pendaftaran berjalan lancar,” ujar Alex.

Sosialisasi ini menghadirkan Ranie Utami Ronie, Kasubdit Permohonan dan Pelayanan Merek DJKI, sebagai narasumber, dengan Riswandi, Kabid Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel, sebagai moderator. Materi yang disampaikan menekankan aspek teknis dan manfaat strategis pendaftaran merek kolektif bagi koperasi, termasuk perlindungan hukum dan potensi peningkatan nilai ekonomi produk daerah.



Sebagai bentuk keterbukaan akses informasi, kegiatan ini juga disiarkan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan Live Streaming di kanal YouTube resmi Kanwil Kemenkum Kalsel, sehingga dapat menjangkau lebih luas peserta maupun masyarakat yang ingin memahami pentingnya pendaftaran merek kolektif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat lebih memahami pentingnya pendaftaran merek kolektif sebagai instrumen untuk memperkuat posisi usaha lokal, mendukung ekonomi kreatif, serta membawa produk khas Kalimantan Selatan lebih dikenal di pasar nasional maupun internasional.



Kemenkum Kalsel Gelar Sosialisasi Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah pada Rabu (17/9/2025) di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini menghadirkan Erwin Widayat, Pengelola PBJ Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Direktorat Jenderal Pemasarakatan, yang juga tergabung dalam Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI). Dalam pemaparannya, Erwin menekankan pentingnya pemahaman regulasi terbaru terkait pengadaan, khususnya setelah terbitnya Perpres No. 46 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Kepala Bagian TU dan Umum, Rustam Sakka menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Kalsel untuk meningkatkan kapasitas aparatur di bidang pengadaan.

“Dengan pemahaman yang baik, diharapkan seluruh pelaksana PBJ di lingkungan Kemenkum dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan sesuai ketentuan,” ungkapnya.



“Tujuan utama pengadaan adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap rupiah yang dibelanjakan, sekaligus mendorong penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan peran usaha kecil dan koperasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tahapan pengadaan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga serah terima hasil pekerjaan. Materi yang dipaparkan turut menyoroti berbagai metode pengadaan, jenis kontrak, serta ketentuan pelaksanaan kontrak agar lebih efektif, efisien, dan sesuai prinsip akuntabilitas.



Kemenkum Kalsel Perkuat Dasar Hukum Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui Harmonisasi

Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan rapat harmonisasi pada Kamis (18/09/2025) di Balai Pertemuan Garuda. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bersama perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Agenda rapat difokuskan pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Raperda ini diharapkan menjadi payung hukum dalam pengelolaan limbah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam pembahasan, berbagai substansi penting ditelaah bersama, mulai dari asas pengelolaan, ruang lingkup pengaturan, hak dan kewajiban masyarakat, hingga pengenaan retribusi atas jasa pelayanan. Kanwil Kemenkum Kalsel menekankan pentingnya kepastian hukum serta keterpaduan antara aspek teknis, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah.

Kakanwil Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa harmonisasi yang dilakukan merupakan langkah penting untuk memastikan setiap pasal dalam Raperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta selaras dengan kebutuhan daerah.

"Harapannya melalui harmonisasi ini dapat menghasilkan produk hukum yang jelas dan berkualitas sehingga dapat mendukung program nasional, sekaligus memperkuat implementasi kebijakan daerah," ungkapnya.



Produk Hukum Berkualitas: Kemenkum Kalsel Rampungkan Harmonisasi Ranperda Air Limbah Domestik HSU



Banjarmasin, Humas_Info – Proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan pada Kamis (18/09/2025) di Balai Pertemuan Garuda telah rampung. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bersama perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Usai pembahasan, hasil harmonisasi diserahkan secara resmi kepada perwakilan Pemerintah Daerah. Penyerahan ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah, sebelum Ranperda dibahas lebih lanjut di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini menekankan prinsip keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengendalikan pembuangan limbah rumah tangga serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kakanwil Alex Cosmas Pinem menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun dalam proses harmonisasi.

“Kami berharap hasil harmonisasi ini segera ditindaklanjuti sehingga dapat menjadi instrumen hukum yang efektif. Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbaknum) juga akan terus kita dorong sebagai wadah untuk memberikan informasi hukum, layanan konsultasi, mediasi, sekaligus sarana literasi hukum bagi masyarakat,” ujarnya.



Audiensi Kanwil Kemenkum Kalsel dengan Polda Kalsel, Bahas Kolaborasi dan Pemanfaatan Fasilitas Bersama



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan audiensi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) pada Kamis (18/9/25) bertempat di Ruang Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, bersama jajaran, antara lain Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, Kepala Divisi PPPH Anton Edward Wardhana, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rustam Sakka. Dari pihak Polda Kalsel, hadir Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, beserta pejabat utama.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas kerja sama pemanfaatan lahan bersama, mengingat posisi Polda Kalsel dan Kanwil Kemenkum Kalsel yang bersebelahan. Pembahasan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Polda Kalsel dalam membangun sinergi. “Kami memandang audiensi ini unruk silaturahmi serta sebagai wujud nyata semangat kebersamaan, sekaligus fondasi penting dalam menjalin kerja sama yang saling menguatkan,” ucapnya.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, juga menegaskan pentingnya mempererat kolaborasi. Kapolda menyambut baik sinergi ini. Dengan komunikasi yang terjaga, hubungan baik antara kedua institusi akan semakin solid dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

Usai pertemuan, Kakanwil dan Kapolda berkesempatan meninjau langsung lingkungan Polda Kalsel. Pada kesempatan ini rombongan juga melihat area kantin yang baru saja diresmikan dan kini terbuka untuk umum. Kapolda menjelaskan, fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pegawai Kanwil Kemenkum Kalsel setelah nantinya menempati kantor baru yang bersebelahan dengan Polda.

Melalui audiensi dan peninjauan ini, sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Polda Kalsel semakin diteguhkan sebagai bentuk kolaborasi nyata antar-lembaga di Kalimantan Selatan.



Kanwil Kemenkum Kalsel dan Polda Kalsel Bahas Kolaborasi Pos Bantuan Hukum dan Penguatan Peran PPNS



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kapolda Kalimantan Selatan, Kamis (18/9), selain membahas sinergi pemanfaatan lahan bersama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) juga menggelar audiensi mengenai kolaborasi dalam program Pos Bantuan Hukum (Posbakum) serta penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa dukungan dari jajaran kepolisian, khususnya melalui peran Bhabinkamtibmas, sangat penting dalam keberhasilan Posbakum yang tengah dicanangkan. “Kami berharap peran dan dukungan Bhabinkamtibmas nantinya dapat bersinergi dengan Posbakum sebagai garda terdepan hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Alex menekankan peran strategis PPNS yang berada di bawah pembinaan Polri dan dilantik oleh Kemenkum. “Kami melihat PPNS memiliki posisi penting untuk memperkuat penegakan hukum. Pembinaan oleh Polda Kalimantan Selatan kepada PPNS diharapkan dapat membanru dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki,” tambahnya.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, menyambut baik sinergi yang dibangun.

“Kami mendukung penuh program Posbakum sebagai wujud hadirnya negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan akses keadilan. Peran Bhabinkamtibmas akan kami arahkan agar bisa berkolaborasi di lapangan,” ucapnya.

Terkait PPNS, Kapolda juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama erat dengan Kemenkum. “Kami siap mendukung pembinaan PPNS agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas,” katanya.

Melalui audiensi ini, kedua pihak sepakat memperkuat kerja sama agar program Posbakum dan peran PPNS di Kalimantan Selatan semakin efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.



SI DIYANK KALSEL Raih Juara 3 KOMVAS 2025: Inovasi Digital Kanwil Kemenkum Kalsel Diakui di Tingkat Kota Banjarmasin



Banjarmasin, KI_Info – Inovasi digital Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Aplikasi SI DIYANK KALSEL (Sistem Aplikasi Data Inventarisasi Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal Kalimantan Selatan) berhasil meraih Juara 3 Kategori Masyarakat Umum dalam ajang Kompetisi Inovasi (KOMVAS) Kota Banjarmasin Tahun 2025.

Acara penganugerahan digelar oleh Bappeda Litbang Kota Banjarmasin pada Kamis (18/9/2025) bertempat di Aula Kayuh Baimbai Pemko Banjarmasin. Kegiatan ini diikuti oleh 43 nominator inovasi yang sebelumnya telah melalui tahapan presentasi dan penilaian oleh dewan juri dari berbagai instansi, antara lain BSKDN Kementerian Dalam Negeri, BRIN, Kementerian PANRB, BRIDa Provinsi Kalsel, Universitas Lambung Mangkurat, BPD Bank Kalsel, serta Eco Enzyme Nusantara Provinsi Kalsel.

Dari sembilan inovasi terbaik yang masuk tahap final, SI DIYANK KALSEL yang digagas oleh Eka Shanty Maulina, M. Aji Rifani dan Togi Leonardo Situmorang tersebut dinilai mampu memberikan terobosan baru dalam mendukung pencatatan dan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Kalimantan Selatan. Inovasi ini sekaligus memperkuat citra Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai instansi pelayan publik yang adaptif dan inovatif.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Walikota Banjarmasin, H.M. Yamin HR, kepada perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel. Ke depan, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mendorong penerapan aplikasi SI DIYANK KALSEL secara berkelanjutan, termasuk memperluas kerja sama dengan Pemerintah Daerah guna mendukung optimalisasi perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Banua.



Rapat Koordinasi Klaster Inovasi Desa, Kanwil Kemenkum Kalsel Tekankan Aspek Legalitas dan Sertifikasi



Banjarbaru, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Klaster Inovasi Desa Tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (19/09/2025) di Aula Desa Mandiri, Banjarbaru.

Rapat ini menjadi bagian penting dalam upaya percepatan pembangunan desa melalui pengembangan inovasi desa di Kalimantan Selatan. Kegiatan dihadiri oleh berbagai instansi, antara lain Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, serta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah strategis mendukung program Klaster Inovasi Desa (KID), dengan fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan pelaku usaha desa, serta pemanfaatan potensi lokal. Program KID diarahkan untuk mendorong pengelolaan lingkungan, penanggulangan bencana, dan penciptaan iklim pemberdayaan masyarakat yang mendukung pembangunan desa serta peningkatan Indeks Desa.

Namun demikian, teridentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi, antara lain belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal, belum adanya desa percontohan yang sepenuhnya menerapkan konsep desa cerdas, serta kurangnya sinergitas antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih dengan unit usaha masyarakat desa.



Setiap instansi yang terlibat memiliki peran strategis. DPMD Kalsel berfokus pada penguatan iklim inovasi, BRIDA dan Poltekkes mendukung budaya inovasi, Dinas Koperasi dan UKM bersama Dinas Perindustrian mendorong penguatan kelompok usaha, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menitikberatkan pada pemanfaatan inovasi berbasis lingkungan. Sementara itu, Kanwil Kemenkum Kalsel berperan penting dalam aspek standarisasi dan legalitas, mulai dari sertifikasi PIRT, halal, HAKI, hingga dukungan branding produk desa.

Selain itu, disampaikan pula bahwa Surat Keputusan (SK) Anggota Tim Percepatan Klaster Inovasi Desa telah ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Tim juga telah menyusun jadwal kunjungan lapangan untuk mengidentifikasi produk unggulan desa di berbagai kabupaten/kota sebagai bagian dari baseline desa percontohan. Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan desa, mewujudkan desa inovatif, dan meningkatkan status Indeks Desa di Kalimantan Selatan.





**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](#)



[@kemenkumkalsel](#)



[kalsel.kemenkum.go.id](#)